

Komnas HAM Minta Pemerintah Cermat Tangani Gafatar

Eks pentolan Gafatar Jawa Timur mengaku bertobat.

Sukma Loppies

sukma@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila, meminta pemerintah cermat dan berhati-hati menangani Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar. Komnas HAM menekankan tidak boleh ada diskriminasi dan kekerasan, saat pembinaan maupun pemulihan para pengikut Gafatar.

Menurut Siti, negara wajib melindungi masyarakat sipil. Menurut dia, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, negara harus melindungi masyarakat yang kehilangan keluarga karena diduga menjadi pengikut Gafatar. Hal ini menjadi perhatian setelah adanya laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarga.

Kedua, negara harus melindungi pengikut Gafatar yang membangun komunitas. Ketiga, negara harus melindungi masyarakat yang merasa terancam dengan kedatangan kembali pengikut Gafatar. Demikian pula sebaliknya, pengikut Gafatar yang takut kembali ke daerah asalnya, setelah dipulangkan dari Kalimantan Barat, juga harus dilindungi.

"Tidak boleh ada keke-
rasan dan diskriminasi
terhadap tiga kelompok
itu," ujar Siti selepas
membuka pameran seni di
Taman Budaya Yogyakarta,
kemarin.

Siti menilai pemerin-
tah daerah gagal mengan-
tisipasi insiden pem-
bakaran rumah pengikut
Gafatar di Mempawah
pada 19 Januari lalu.
"Pemerintah daerah lalai.
Ada ribuan pengikut
Gafatar ke Kalimantan
Barat, tapi kok tidak tahu?"
ujar dia.

Pengikut Gafatar saat
ini ditampung di sejumlah
tempat pengungsian untuk
diberi pembinaan oleh
dinas sosial setempat.
Namun, Kepala Dinas
Sosial Yogyakarta, Untung
Sukaryadi, mengatakan
menangani pengikut Gafa-
tar yang hampir 300 orang
itu lebih sulit ketimbang
menangani korban
bencana alam.

Untung mengatakan
248 pengikut Gafatar
yang ditampung di gedung
Youth Center di Sleman
sulit dikumpulkan untuk
mengikuti kegiatan
rohani dan pembinaan
soal kebangsaan. Dia
mencontohkan, saat diajak
salat berjemaah bagi
pemeluk agama Islam,
hanya satu orang yang
mengikuti. "Selebihnya,
mereka lebih suka duduk
bersama kelompok-

nya," ujar Untung saat
rapat dengar pendapat
dengan Komisi D DPRD
Yogyakarta.

Soal penanganan
pengikut Gafatar, Sekre-
taris Daerah Yogya-
karta Ichsanuri menilai
transmigrasi bukan solusi
yang tepat. Dia lebih setuju
memberdayakan mereka
yang memiliki keahlian
untuk mengembangkannya
bagi kepentingan masya-
rakat. "Pemerintah bisa
memfasilitasi mereka," ujar
Ichsanuri.

Dari Sidoarjo, Koor-
dinator Wilayah Gafatar
Jawa Timur, Supardan, 43
tahun, mengatakan sudah
tobat. Supardan ingin
kembali hidup seperti
sedia kala sebelum dirinya
menjadi pengurus Gafatar.
Meski begitu, Supardan
yang kini tinggal di
rumah keponakannya di
perumahan Alamanda,
Desa Dukuh Tengah,
masih menganggap Ahmad
Mushadeq sebagai guru
spiritual. "Sejak 2004,
saya bergabung Qiyadah
Islamiyah," ujar dia.

Kepala Desa Dukuh
Tengah, M. Arif, tak serta-
merta percaya pengakuan
Supardan. Arif sempat
mengajak Supardan berbin-
cang-bincang di balai desa.
Dari obrolan itu, kata Arif,
Supardan masih memegang
prinsip ajarannya. "Masih
jauh untuk bisa berubah,"
ujar Arif. Tapi, ia tetap
menerima Supardan untuk
tinggal di desanya.

● SHINTA MAHARANI | PITO AGUSTIN

RUDIANA | NUR HADI



Pengikut Gafatar Arif Rahman Hakim, menunjukkan foto massa saat membakar permukiman anggota Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat, usai menyampaikan pengaduan dan meminta perlindungan, di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, kemarin.